

Kegagalan Politik Multikulturalisme dan Pelembagaan Islamofobia di Negara-Negara Barat

M. Amin Nurdin

Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

amin_nurd@yahoo.com

Abstract: *In the past decades, multiculturalism as a policy in Western Europe and in the United States of America was taken for granted as a kind of 'success story' for a 'New World' to replace the 'Old World' connotated with conservatism, racism and facism. But nowadays, new debates arise on the contestation between multiculturalism policy and terror attacks by certain radical groups on behalf of Islam. Muslims now are seen as potential threats for Western hegemony, and are considered not compatible with Western democracy values. Judging this, a question arises: is multiculturalism policy still need to be sustained? Is this an end or the failure of the multiculturalism ideology following the development of Islamophobia? This paper analyzes sources of the many success and failure factors in the practice of multiculturalism in the Western countries.*

Keywords: *Multiculturalism, Islamophobia, Civilization*

Abstrak: *Sejak tahun 1970-an, multikulturalisme telah sukses menjadi ideologi dan memulai babak baru dalam sejarah negara-negara Barat dalam mengelola masyarakat multikultural yang berbeda latar belakang bangsa, etnis, budaya, dan agama. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi dua dasawarsa terakhir. Muncul perdebatan hangat bahwa ideologi multikulturalisme telah gagal mengintegrasikan kaum imigran, terutama kelompok Muslim dengan nilai-nilai Barat. Berbagai peristiwa kekerasan dan teror yang dilakukan kelompok ekstrim tersebut telah mengembangkan sikap Islamofobia, anti Islam dan kaum Muslim. Karena itu ideologi ini dianggap telah gagal memperkuat identitas negara. Masih perlukah kebijakan multikulturalisme dipertahankan? Tulisan ini membahas faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan praktik multikulturalisme di negara-negara Barat.*

Katakunci: *Multikulturalisme, Islamofobia, Peradaban*

Pendahuluan

Realitas sosial penduduk negara-negara Barat yang begitu majemuk, termasuk negara Australia yang berada di Asia, telah mendorong pemerintah masing-masing pada tahun 1970an untuk melakukan rekayasa sosial politik (*social engeneering*) dengan

menjadikan multikulturalisme sebagai ideologi negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mereduksi konflik nilai-nilai dan norma-norma yang saling bertentangan antar berbagai kelompok masyarakat; kaum kulit putih di satu pihak dan para imigran datang ke negara-negara tersebut di lain pihak, sekaligus

memperkuat identitas nasional. Implementasi ideologi ini dianggap berhasil mengelola berbagai konflik yang diindikasikan dengan rendah ragam potensi kekerasan politik, etnik dan keagamaan, termasuk terorisme, bila dibandingkan dengan negara-negara di Timur-Tengah, Tiongkok dan Asia Tenggara. Implikasi multikulturalisme tampak pula pada perkembangan komunitas etnis-etnis imigran dan komunitas agama lainnya—yang dilindungi warisan kultural mereka sehingga bisa berintegrasi dan *survive*.¹

Bila melihat kondisi sosial sebelumnya, apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa Barat serta Australia, sampai dengan Perang Dunia II, masyarakat mereka hanya mengenal satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Sedangkan kelompok-kelompok sosial lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut digolongkan sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka yang dibatasi atau dikebiri. Di Amerika Serikat berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950an. Puncaknya adalah pada tahun 1960an dengan dilarang perlakuan diskriminasi oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam dan berwarna di tempat-tempat umum, perjuangan hak-hak sipil, dan dilanjutkan perjuangan hak-hak sipil ini secara lebih efektif melalui berbagai kegiatan *affirmative action* yang membantu mereka yang tergolong sebagai yang terpuruk dan minoritas untuk dapat mengejar ketinggalan mereka dari golongan

kulit putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai bidang pekerjaan dan usaha.

Di tahun 1970an upaya-upaya untuk mencapai kesederajatan dalam perbedaan mengalami berbagai hambatan, karena corak kebudayaan kulit putih yang Protestan dan dominan itu berbeda dari corak kebudayaan orang kulit hitam, orang Indian atau pribumi Amerika, dan dari berbagai kebudayaan bangsa dan sukubangsa yang tergolong minoritas. Jadi kalau Habel mengatakan bahwa “*we are all multiculturalists now*,” dia menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada masa sekarang ini di Amerika Serikat, dan gejala tersebut adalah produk dari serangkaian proses-proses pendidikan multikulturalisme yang dilakukan sejak tahun 1970an.²

Sebelum kemunculan multikulturalisme, kebijakan imigrasi massal yang diambil pemerintah negara-negara Barat bukanlah dirancang untuk menciptakan sebuah masyarakat yang beraneka secara budaya dan agama. Imigrasi semula diharapkan menjadi alat pertumbuhan dan pembangunan negara berdasarkan pemikiran asimilasi. Konsep ini dilandasi atas suatu asumsi bahwa kaum imigran dalam satu atau dua generasi akan melebur dalam *mainstream* budaya masyarakat yang individualistik dan sekularistik, dan mereka akan meninggalkan identitas budaya asli mereka atau setidaknya membatasi dalam batas-batas pribadi saja.

Namun seiring dengan muncul kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan bagi kelompok minoritas di tengah publik, ideologi asimilasi

¹ The Australian Council on Population and Ethnic Affairs, *Multiculturalism for All Australian: Our Developing Nationhood*, Commonwealth of Australia, Canberra, 1982, 7.

² Norman C. Habel, “Introduction,” dalam Norman C. Habel (ed.), *Religion and Multiculturalism in Australia* (Adelaide: Australian Association for the Study of Religious (AASR), 1992), 12.

yang rasis, diskriminatif, dan etnosentris ini menuai kritik tajam di tahun 1960an. Wacana perbaikan kelompok minoritas memunculkan sebuah pandangan baru dalam melihat relasi antar-etnis yang dikenal sebagai ideologi multikulturalisme.

Multikulturalisme sebagai fenomena dunia modern yang muncul di awal tahun 1960an dan mendapatkan legitimasi di tahun 1970an merupakan sebuah model alternatif di dalam membangun negara dan mengelola kemajemukan masyarakat. Multikulturalisme menekankan betapa pentingnya memelihara pluralisme budaya dan memertahankan warisan budaya, termasuk agama. Dalam perkembangannya, sejarah multikulturalisme bukan lagi hanya sebatas toleransi, tetapi meningkat pada dimensi keadilan sosial seluruh masyarakat tanpa memerdulikan latar belakang ras, budaya, etnis, dan agama.

Keberhasilan praktik multikulturalisme dalam mengelola masyarakat multikultural telah dibuktikan di berbagai negara, seperti Canada dan Australia, dengan melakukan dua tahap, yaitu a) penekanan pada keanekaan budaya dan b) dimensi keadilan sosial.

Penekanan pada Keanekaan Budaya

Pada tahap pertama, multikulturalisme sebagai penegasan positif keanekaan budaya menekankan pada pentingnya pemeliharaan budaya, agar memberi dorongan pada orang untuk memertahankan warisan budayanya dan menghargai tradisi-tradisi budaya yang beraneka. Prinsip paling penting yang diperhalus dalam tahap ini adalah prinsip toleransi, berdasarkan pandangan bahwa masyarakat harus memberi penghargaan yang sama pada tradisi budaya orang lain, dan suatu penerimaan bahwa tradisi-tradisi

ini seharusnya bergerak maju dalam konteks sebuah masyarakat yang demokratis yang menghormati hak-hak tiap individu.

Multikulturalisme, dalam pengertian ini, dilihat sebagai kepanjangan hak-hak sipil dan politik orang yang hidup dalam suasana demokrasi yang mengabsahkan hak-hak tersebut, dan di mana setiap orang berhak untuk melindungi bentuk-bentuk budaya yang berbeda, bentuk-bentuk budaya yang berdasarkan pada latar belakang pribadi dan sejarah sendiri. Basis ikatan sosial dalam sebuah masyarakat yang berkebudayaan beraneka, selama tahap ini, dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar yang klasik dan liberal. Dalam konteks ini, kebebasan berbicara dan berekspresi merupakan prinsip yang sangat penting bila diberi penekanan pada hak-hak semua orang untuk hidup menurut budaya dan/atau bentuk-bentuk agama yang beraneka.

Dimensi Keadilan Sosial

Seperti diindikasikan, *tahap kedua* dalam perkembangan multikulturalisme adalah dimensi keadilan. Menurut pandangan ini, multikulturalisme bukan hanya mengenai pemberian kemerdekaan pribadi per orang, tetapi juga tentang keadilan sosial murni bagi semua orang tanpa memerdulikan latar belakang ras, budaya, etnis atau agama. Prinsip mendasar di sini adalah bahwa orang di negara-negara Barat, dari latar belakang beraneka, berhak memperoleh persamaan sosial yang murni, terutama persamaan dalam memperoleh akses pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Apa yang diperlukan bukan hanya kebebasan politik, tetapi keadilan sosial bagi semua orang, tak peduli apa ras atau latar belakang budayanya.

Tinjauan pada Multikulturalisme

Apa yang jelas dari semua ini adalah bahwa falsafah multikultural, dalam evolusinya, telah memasukkan sejumlah tahapan-tahapan. Dengan demikian, multikulturalisme menjadi dewasa sampai pada kedudukan yang memungkinkan untuk menjadi optimistik tentang hasil multikulturalisme sebagai sebuah percobaan sosial.

Betulkah multikulturalisme dapat menjadi model alternatif dalam membangun masa depan bangsa seperti terbukti di atas? Pertanyaan ini menimbulkan dua pendapat yang dapat dilihat dari sisi negatif dan positif. Pandangan yang negatif mengatakan bahwa multikulturalisme dan etnisitas merupakan suatu ancaman bagi bangsa dan *way of life* Barat. Pendapat sebaliknya mengatakan, ideologi multikulturalisme dan etnisitas mampu memecahkan masalah hak-hak sosial, politik, dan ekonomi kelompok minoritas.³

Pandangan positif dari ideologi ini berangkat dari pengalaman negara-negara yang sudah menjadikan multikulturalisme sebagai ideologi dengan contoh negara Australia dan Canada yang penduduknya bersifat multi-etnis, dan bangsa ini terlihat mampu meredam ketegangan-ketegangan dan kekerasan-kekerasan dalam bentuk konflik budaya dan agama, termasuk bentuk terorisme serta radikalisme. Kedua negara ini, khususnya Australia, banyak dijadikan model multikulturalisme di banyak negara dunia dalam membangun suatu kesatuan sosial (*social integration*) dan kohesi sosial (*social cohesiveness*) hingga saat ini.⁴

³ Tariq Moqdood, *Multiculturalism: Themes for Twenty Centuries Series* (London: Polity Press, 2007), 1.

⁴ Stefan Kerkyasharian A.M., *Multiculturalism in Australia—Today and Tomorrow* (Sydney: Ethnic Affairs Commission of NSW, 1998), 5.

Sejak tahun 1970an, multikulturalisme telah menjadi ideologi negara dan menjadi babak baru sejarah negara-negara Barat dalam menapak jalan kenegaraan dan kebangsaan di masa berikutnya. Ini merupakan sebuah usaha domestikasi komunitas-komunitas sosial etnik yang bertaburan dan fluktuatif serta rawan konflik. Babak baru dimulai setelah berbagai usaha dilakukan negara sebelumnya di dalam menerima kehadiran para migran.

Sementara itu pandangan yang menolak multikulturalisme akhir-akhir ini berkembang dengan pesat di negara-negara Eropa, bahwa multikulturalisme telah gagal diterapkan di Eropa. Kegagalan tersebut disebabkan oleh faktor imigran (etnis), terutama yang beragama Islam, dianggap sebagai ancaman dan berbahaya bagi *way of life* bangsa Barat, karena ideologi Islam tidak bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai sekuler, seperti demokrasi, sekularisasi, dan kesetaraan jender. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila akhir-akhir ini negara-negara Eropa mengambil kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme itu sendiri.⁵

Perdebatan hangat tentang kegagalan multikulturalisme di Eropa dimulai sejak tiga tahun terakhir ini dengan topik utama bahwa ideologi multikulturalisme telah gagal mengintegrasikan kaum imigran, terutama kelompok Muslim, dengan nilai-nilai Barat sehingga perlu dikaji ulang. Perdebatan itu muncul kembali setelah peristiwa bom Boston, penyerangan Woolwich dan aksi protes Stockholm. Masyarakat Eropa merasa mendapat pembenaran atas berbagai

⁵ Tariq Moqdood, *Multiculturalism: Themes for Twenty Centuries Series*, 1.

peristiwa tersebut untuk mengatakan bahwa multikulturalisme di Eropa telah gagal.⁶

Sebenarnya perdebatan berakhir era multikulturalisme bukanlah untuk pertama kali muncul. The *New Statesman* di tahun 2002 memuat laporan tentang kematian ideologi tersebut dikaitkankan dengan habis batas kesabaran dan toleransi Barat atas kejadian peristiwa 11 September 2001. Di tahun 2004 the *Independent* mencatat persetujuan the Commission for Racial Equality tentang telah berakhir ideologi multikulturalisme, meskipun ideologi tersebut tetap berlanjut dan tidak mati.⁷

Secara terang-terangan pemerintah Jerman, Inggris, dan Perancis, menganggap ideologi ini telah gagal, oleh karena itu mereka kembali kepada kebijakan yang lama, yaitu *asimilasi* dan *monokulturalisme*.⁸ Seperti yang dikatakan Kanselir Jerman dalam sebuah pidatonya bahwa Jerman sama sekali gagal membangun upaya sebuah masyarakat yang multikultural. Konsep multikulturalisme dengan tujuan masyarakat yang berdampingan secara rukun tidak bekerja sepenuhnya. Ia melihat secara spesifik, yaitu Islam dan kelompok Muslim sebagai warga pendatang dari Turki dan negara-negara Arab sangat sulit membaur dengan nilai-nilai Barat, khususnya Jerman.⁹

⁶ Derek McGhee, *The End of Multiculturalism: Terrorism, Integration and Human Rights* (London: McGraw-Hill Education, 2008), 3.

⁷ Derek McGhee, *The End of Multiculturalism: Terrorism, Integration and Human Rights*, 3.

⁸ Degradasi multikulturalisme ke arah asimilasi juga telah diramalkan seorang tokoh Islam Inggris Tahir Abbas. Baca Tahir Abbas, "Religion, Radicalism and Multiculturalism: Indonesia and UK Experience," International Seminar Paper (Jakarta: Muhammadiyah dan British Council, 30 Januari, 2006), 26.

⁹ Angela Merkel, "Multikulturalisme di Jerman Telah Gagal," diakses 07 Agustus 2014 pukul 09.51,

Begitu pula Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron, pada 5 Februari 2011, menyatakan hal yang serupa dengan Kanselir Jerman. Ia mengatakan negara multikulturalisme telah gagal dan mengimbau pemerintah untuk mewaspadai radikalisme di kalangan pemuda. Cameron yang berbicara dalam sebuah konferensi di Munich, Jerman, menyatakan perlu ada sebuah kebijakan aktif yang bisa menyembuhkan hal ini serta mempromosikan nilai-nilai Barat. Ia mengimbau agar Inggris dan Uni Eropa (UE) mewaspadai apa yang sedang terjadi. Ia menyebutkan,

Di bawah doktrin negara multikultural, kita membiarkan berbagai macam kebudayaan tumbuh menjauh antara satu dengan lainnya. Kita telah gagal menciptakan sebuah visi yang membuat masyarakat merasa nyaman.¹⁰

Terhadap berbagai pendapat di atas, pemerintah dan politisi Eropa menegaskan bahwa kegagalan multikulturalisme adalah juga karena kegagalan kelompok Muslim di Eropa untuk menyesuaikan diri dengan peradaban Eropa yang berbasis pada tradisi Yahudi Kristen atau kebudayaan Eropa dan identitasnya. Persepsi ini kemudian memunculkan sentimen yang berbau rasisme kebudayaan dan agama, yaitu Islamofobia. Islamofobia adalah suatu sikap permusuhan dan kebencian terhadap Islam.

Di tahun 1997, *the Runnymede Trust*, sebuah kelompok *think-tank* Inggris yang sangat berpengaruh menerbitkan sebuah laporan

dari; <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/18/140864-angelamerkel-multikultur-alisme-jerman-telah-gagal>

¹⁰ Angela Merkel, "Multikulturalisme di Jerman Telah Gagal."

berjudul “Islamophobia: A Challenge for Us All.” Dalam laporan tersebut disebutkan ada sikap kebencian dan permusuhan terhadap Islam karena itu masyarakat Eropa tidak menyukai semua kelompok Muslim. Fenomena ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1970 dan sekarang memuncak menjadi fenomena sosial di seluruh negara-negara Eropa.¹¹

Sikap Islamofobia di Eropa terlihat jelas pada Partai British National Party (BNP) di Inggris, yang menggunakan isu sebagai kampanye politik. Di Belanda Geert Wilders juga menggunakan cara-cara seperti ini dalam pemilihan anggota parlemen bagi partainya, Party For Freedom (PVV), atau Partij voor de Vrijheid. Begitu pula di negara tetangganya, Belgia dan Swedia juga menampakkan gejala serupa. Demikian pula di Prancis.¹²

Akibatnya, semua permasalahan multikulturalisme kembali lagi pada isu rasial. Rasialisme sendiri masih dapat dirasakan sangat kuat di negara-negara Eropa. Contohnya pemain bola Zinedine Zidane. Ia adalah warga negara Perancis keturunan Aljazair. Ketika masih kanak-kanak ia sering diejek teman-temannya karena ia adalah seorang keturunan Afrika. Dalam situasi seperti ini integrasi sangat sulit untuk diwujudkan, walaupun terwujud integrasi yang tercipta merupakan hasil paksaan dan tidak akan bertahan lama. Tetapi bagaimanapun juga para imigran ini telah berjasa banyak dalam kejayaan Perancis. Bisa dilihat dari tim sepak bola nasional Perancis yang 80% pemainnya berkulit hitam dan berwajah Arab.¹³

Dalam sebuah artikel diterbitkan oleh lembaga *think-tank* Foreign Policy in Focus,

9 April 2010, Jeane Kay menyebut perang terhadap terorisme yang dilancarkan AS dan obsesi antiterorisme masyarakat global turut menyumbang rasa anti-Islam di kalangan masyarakat Eropa. Beberapa kota di Eropa turut menjadi sasaran serangan teror, seperti Madrid (2004) dan London (2005), dan baru-baru ini terbongkar plot serangan teror Al-Qaeda ke beberapa kota utama di Eropa.¹⁴

Sikap kebencian dan permusuhan terhadap agama (*Islamophobia*) secara definitif mengalami perubahan dari yang bersifat biologis atau psikologis menjelma menjadi anti Islam, yang dikenal dengan istilah rasisme kebudayaan (*cultural racism*.)

Menurut Gabriele Marraci, kegagalan multikulturalisme di negara-negara Eropa berakar bukan hanya dilandasi rasa ketakutan Barat terhadap Islam, tetapi juga muncul rasa ketakutan terhadap ideologi multikulturalisme itu sendiri dengan segala konsekuensinya. Masyarakat Barat menganggap kelompok Muslim bukan hanya sebagai ‘orang asing’ (*aliens*), tetapi juga berbahaya, karena itu tidak cocok duduk bersanding dengan tradisi Barat. Muncul sikap stereotip dan *labelling* (*cap*) yang mengandung kebencian dan permusuhan terhadap Islam dan menyebar ke seluruh masyarakat Eropa melalui media massa dan dipolitisir oleh para politisi, yang sebenarnya tidak mewakili gambaran dunia Islam dan gaya hidup mereka sebagai ‘orang asing’ bagi nilai-nilai Barat.

Kebencian terhadap Islam, di satu sisi tidak hanya mendiskreditkan multikulturalisme, tetapi di sisi lain juga menumbuhkan-kembangkan tesis Huntington *clash of civilizations* antara Barat dan Islam. Peradaban Islam dianggap

¹¹ www.runnymedetrust.org, 1997.

¹² www.runnymedetrust.org, 1997.

¹³ <http://www.parlezfrancais.net/2008/03/multikulturalisme-la-prancis.html>

¹⁴ Dahono Fitrianto, “Dilema Multikulturalisme Eropa,” *Kompas*, 24 Oktober 2010.

sebagai *musuh dalam selimut* bagi peradaban Barat. Isu ini kemudian menjadi bagian dari isu sentral di abad ke-21, khususnya di negara-negara Barat.¹⁵

Senada dengan di atas, teori Huntington *clash of civilizations* antara Barat dan Islam juga telah menjadi inspirasi Islamofobia oleh banyak tokoh pemerintah, seperti Donald Rumsfeld, Vladimir, Putin dan Silvio Berlusconi dalam mengambil kebijakan pemerintah.¹⁶

Begitu pula di Amerika Serikat, Islamofobia telah berkembang selama bertahun-tahun dan semakin meningkat sejak terjadi peristiwa penyerangan World Trade Center (WTC), 11 September 2011. Peristiwa penyerangan tersebut telah menimbulkan gelombang anti Muslim di berbagai kota. Hal ini semakin diperburuk dengan pernyataan tokoh Kristen Amerika, seperti Pat Robertson dan Jerry Falwell, yang memertanyakan apakah Islam sebagai sebuah agama, dan lalu memberikan cap (label) Nabi Muhammad sebagai perampok, dan teroris. Bahkan senator Saxby Chambliss menyatakan agar polisi menangkap setiap Muslim yang melewati perbatasan negara-negara federal.¹⁷

Di sini terlihat ada paradoks terhadap multikulturalisme itu sendiri. Di satu pihak, kelompok minoritas perlu diakomodasi dalam suatu proses integrasi sosial, tetapi di lain pihak ideologi sekularisme Barat berikut lembaga-lembaganya justru menjadi penghambat akomodasi kaum Muslim. Pemerintah Inggris memberlakukan undang-undang pembatasan

kaum Muslim sebagai kelompok dari *the Race Relations Act* di tahun 1976, meskipun mereka lahir di negara tersebut. Begitu pula undang-undang Prancis yang melarang pemakaian cadar/burqa, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai supremasi dan *mainstream* Barat. Dalam hal ini, unsur budaya dan agama merupakan faktor yang signifikan dalam mengembangkan Islamofobia. Karena itu secara langsung atau tidak langsung terjadi pelembagaan Islamofobia di tengah masyarakat Eropa (*institutionalized Islamophobia*).¹⁸

Dengan demikian, jelas bahwa sebagian besar pemerintah dan politisi Barat berkesimpulan bahwa masyarakat Muslim yang tinggal di negara-negara Barat dianggap tidak *compatible* dengan nilai-nilai Barat yang berakar pada warisan nilai Yahudi dan Kristen. Bahkan mereka juga membahayakan keberlangsungan peradaban Barat. Citra kaum Muslim yang penuh dengan kekerasan (*violent*), berbudaya barbar, dan anti nilai-nilai Barat telah menjadikan mereka potensial sebagai ancaman terhadap *'transnational society.'*

Ancaman tersebut seperti digambarkan Oriana Fallaci, wartawan Italia yang sangat berpengaruh, sebagai bukan dalam bentuk *"the conquest of our territories, but to conquer our souls."* Meski jiwa (*soul*) yang dimaksud bukan dalam arti *spiritual soul*, tetapi *'cultural soul'*. Yang dimaksud Fallaci *'cultural soul'* adalah superioritas peradaban Barat.¹⁹

Ketakutan-ketakutan Barat itu sebenarnya sudah diprediksi Huntington dengan teorinya

¹⁵ Gabriele Marranci, "Multiculturalism, Islam and the Clash of Civilisations Theory: Rethinking Islamophobia," dalam *Culture and Religion*, Vol. 5, No. 1, Routledge, New York, 2004, 105.

¹⁶ "Islamophobia in Britain," <http://www.newstatesman.co.uk/2010>

¹⁷ www.runnymedetrust.org, 1997.

¹⁸ www.runnymedetrust.org, 1997.

¹⁹ Gabriele Marranci, "Multiculturalism, Islam and the Clash of Civilisations Theory: Rethinking Islamophobia," dalam *Culture and Religion*, Vol. 5, No. 1, 105.

clash of civilizations antara peradaban Barat dan peradaban Islam. Disadari atau tidak, teori ini memunyai efek politik dan sosial. Karena itu teori ini menjadi bibit kemunculan pelembagaan Islamofobia di tengah masyarakat Eropa (*institutionalized Islamophobia*), diikuti diskriminasi undang-undang oleh lembaga-lembaga pemerintah yang sebenarnya ditujukan kepada kelompok Muslim.²⁰

Di sini muncullah kritik, bahwa kegagalan multikulturalisme bukanlah datang dari kelompok Muslim, tetapi oleh sikap pemerintah Eropa yang ‘setengah hati’ atau basa-basi dalam mengembangkan konsep multikulturalisme dalam tingkat praktis (*unsustainable*.) Hal ini disebabkan oleh pandangan prejudis terhadap Islam dalam kerangka hegemonik tradisi Barat.

Hal ini terlihat dari penggunaan terma Islamofobia dalam penyerangan simbol-simbol Islam dan praktik ibadah oleh para politisi sebagai komoditi politik untuk menolak multikulturalisme saat menjelang pemilu. Selain itu, faktor krisis ekonomi sejak tahun 2008 yang dialami Barat dan Amerika Serikat akhir-akhir ini juga menjadi alasan tersendiri bagi penolakan multikulturalisme. Faktor ekonomi berkaitan erat dengan semakin tinggi tingkat pengangguran dan kriminalitas, serta semakin meningkat pula sikap anti imigran dan anti Muslim terhadap warga pendatang.

Ibrahim Kalin, cendekiawan Muslim dari Georgetown University, dalam esainya berjudul “Islamophobia dan Batas Multikulturalisme,” mengatakan perdebatan tentang Islam di Eropa merupakan dampak dari kepanikan masyarakat Eropa terhadap isu multikulturalisme. Isu tersebut mengambinghitamkan perkembangan

populasi Muslim di seantero Eropa.²¹ Jumlah penduduk Muslim yang tinggal di negara-negara Barat memang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di Amerika Serikat meningkat tajam dalam satu dekade terakhir. Jumlah umat Muslim di negeri Paman Sam itu mengalahkan jumlah warga Yahudi untuk kali pertama di sebagian besar Midwest. Umat Muslim di AS naik menjadi 2,6 juta orang pada 2010, bertambah dua kali lipat lebih dari satu juta orang pada tahun 2000 lalu.

Dengan kejadian tersebut, karenanya dapat dikatakan bahwa tindakan keji, pembunuhan, kekerasan dan terorisme dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tanpa diduga sebelumnya. Peristiwa ini dapat juga mengingatkan pada pembunuhan dengan menggunakan gas sirin yang terjadi di Jepang dalam beberapa dekade lalu.

Terorisme di Norwegia dengan sel-sel mereka menyatakan sangat anti-multikulturalisme atau keberagaman. Bagi para fundamentalis Kristen itu, multikulturalisme, di negaranya, memberikan ruang untuk Islamisasi.²² Kasus terorisme fundamentalisme Kristen di atas menggambarkan bahwa Eropa saat ini tengah mengalami krisis identitas di mana Islam masuk ke dalam pusaran tersebut. Krisis itu tergambar dari pemboman di Oslo, Norwegia, di mana sang pelaku, Anders Breivik, mengatakan pemboman yang dilakukan merupakan usaha untuk meredam perkembangan populasi Muslim sekaligus dukungan terhadap partai sayap kanan Eropa yang anti imigran.

Simpulan

Multikulturalisme sebagai fenomena dunia modern adalah sebuah model alternatif

²¹ *Republika*, 27 Juli 2011.

²² “Pluralisme di Eropa Terancam,” dalam harian *Haluan*, 29 Juli 2011.

²⁰ www.runnymedetrust.org, 1997.

di dalam membangun Negara dan mengelola kemajemukan masyarakat. Multikulturalisme menekankan betapa pentingnya memelihara pluralisme budaya dan memertahankan warisan budaya, termasuk agama. Dalam perkembangannya, sejarah multikulturalisme bukan lagi hanya sebatas toleransi, tetapi meningkat pada dimensi keadilan sosial seluruh masyarakat tanpa memerdulikan latar belakang ras, budaya, etnis, dan agama.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa respon pemerintah dan masyarakat Barat terhadap multikulturalisme telah memengaruhi *way of life* mereka sehingga membentuk masyarakat baru yang toleran dan menghargai khazanah budaya berbagai lapisan masyarakat, seperti terlihat di dalam keberadaan komunitas Islam Australia yang mendapatkan ruang bagi proses pengembangan komunitas itu sendiri. Implikasi multikulturalisme secara demonstratif telah memunculkan kesetaraan sosial tanpa mengenal latar belakang sosial, budaya, etnik, dan agama sebagai bagian cita-cita nilai demokrasi yang bersifat universal.

Namun dalam perjalanan sejarah multikulturalisme dan eskalasi sosial politik dan ekonomi dunia, muncul ketakutan di dalam masyarakat Eropa bahwa masyarakat pendatang (imigran), khususnya ditujukan kepada kelompok Muslim, tidak bisa menyesuaikan diri dengan tradisi Barat yang berlandaskan pada agama Yahudi dan Kristen. Kelompok ini dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan superioritas peradaban Barat. Ketakutan tersebut berkembang lebih lanjut dengan pernyataan sebagian besar pemerintah dan masyarakat bahwa multikulturalisme telah gagal sehingga muncul kembali kepada ide lama yang bersifat monokultural, yaitu ideologi asimilasi. Dapat dikatakan gagasan ini merupakan

suatu kepanikan masyarakat Eropa sekaligus merupakan *setback* dalam pengelolaan sebuah masyarakat yang multikultural.

Kegagalan multikulturalisme di Barat pada dasarnya berakar pada ketakutan masyarakat Barat bukan hanya kepada Islam, melainkan juga terhadap multikulturalisme itu sendiri. Islam dianggap sebagai tantangan terhadap peradaban Barat dan multikulturalisme merupakan medium tercipta *transnational culture*, yang lambat laun akan menggerogoti nilai-nilai demokrasi liberal yang sekularistik.

Dampak ketakutan terhadap Islam ini melahirkan sikap mental yang bersifat Islamofobia. Sikap kebencian dan permusuhan terhadap Islam menyebar ke seantero Eropa melalui dukungan media massa dan politisi. Islam dan kelompok Muslim dianggap sebagai 'orang asing' (*aliens*), barbar, anti demokrasi, diskriminasi gender, dan lain sebagainya.

Pelembagaan Islamofobia (*institutionalized Islamophobia*) itu tampak dalam pembuatan undang-undang yang bersifat diskriminatif terhadap kaum Muslim. Kelompok Muslim dianggap sebagai 'orang asing' dan karena itu diperlakukan tidak sesuai dengan falsafah dari ideologi multikulturalisme. Perlakuan dalam bentuk relasi sosial dan pelarangan cadar/burqa serta pelarangan pembangunan menara mesjid merupakan bagian dari pelembagaan Islamofobia tersebut.

Ada beberapa faktor lain penyebab kegagalan multikulturalisme di Eropa, antara lain karena kegagalan negara Barat itu sendiri untuk tidak mengembangkan konsep tersebut dalam kehidupan yang praktis. Hal ini memunculkan persepsi bahwa sebenarnya penerapan ideologi tersebut sekadar 'basa-basi' bagi kelompok minoritas. Sikap ini

tampak dalam bentuk diskriminatif atas *privilege* (keistimewaan) terhadap masyarakat yang berdasarkan kulit dan agama.

Acuan Pustaka

- Abbas, Tahir, *Religion, Radicalism and Multiculturalism: Indonesia and UK Experience*. International Seminar Paper, Muhammadiyah dan British Council, 30 Januari, Jakarta, 2006.
- Advisory Council on Multicultural Affairs, *Towards a National Agenda for a multicultural Australia: A Discussion Paper*. Commonwealth of Australia, Canberra, 1988
- Ata, Wade Abe (ed.), *Religion and Ethnic Identity: An Australian Study*. Melbourne, Victoria: Spectrum Publication Pty Ltd., 1988
- Australian Council on Population and Ethnic Affairs, *Multiculturalism for all Australians: Our Developing Nationhood*. Commonwealth of Australia, Canberra, 1982.
- Azra, Azyumardi, *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*. International Centre for Islam and Pluralism, Jakarta, 2006.
- , "Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia," dalam Kongres Budaya Indonesia, yang diadakan oleh Menbudpar RI. Diakses dari www.kongresbud.budpar.go.id, Desember 2006.
- Bainbridge, Sims William, *The Sociology of Religious Movements*. New York: Routledge, 1997.
- Barth, Frederick, *Kelompok Etnik dan Batasannya*, alihbahasa Nining I. Soesilo. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Baubock, Reiner et all (eds.), *The Challenge of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration*. Avebury, Vermont, 1996.
- Habel, Norman C. (ed.), *Religion and Multiculturalism in Australia*. Adelaide: Australian Association for the Study of Religious (AARS), 1992.
- Haddad, Yvonne Yazbeck (ed.), *Muslim in the West*. London: Oxford University Press, 2002.
- Humphrey, Michael, "Is this a Mosque-Free Zone? Islam and State in Australia," *Migration Monitor*, Vol. 12, -----, "An Australian Islam? Religion in the Multicultural City," dalam Abdullah Saeed and Shahram Akbarzadeh, (ed.), *Muslim Communities in Australia*. Sydney: UNSW Press, 2003.
- John, H, Anthony and Saeed, Abdullah, "Muslims in Australia," dalam *Muslim Minorities in the West: Visible and Invisible*. Yvonne Yazbeck Haddad & Jane I. Smith (ed.) New York: Altamira Press, 2002
- Kalin, Ibrahim, "Islamophobia and the Limits of Multiculturalism," dalam John L. Esposito and Ibrahim Kalin (ed.), *The Challenge of Pluralism in the 21st Century: Islamophobia*. New York: Oxford University Press, 2011.
- Marranci, Marranci, "Multiculturalism: Islam and the Class of Civilisations Theory—Rethinking Islamophobia," dalam *Culture and Religion*, Vol. 5, No. 1, Routledge, New York, 2004.
- Moqdood, Tariq, *Multiculturalism: Themes for Twenty Centuries Series*. London: Polity Press, 2007,
- Parekh, Bhikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*.
- Saeed, Abdullah, *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions*, Departement of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs and Australian Multicultural Foundation in Assotiation with The University of Melbourne, 2004.
- Suparlan, Parsudi, "Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme." *Jurnal Studi Amerika*, vol.5 Agustus, 1999.
- , "Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural," Simposium Internasional Bali ke-3, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.
- Vasta, Ellie, "Multiculturalism and Ethnic Identity: The Relationship between Racims and Resistance", in *Australian and New Zealand Journal of Sociology*, Vol. 29, No. 2, August 1993.
- Yin, Robert K., *Case Study Research Design and Methods*. London: Sage Publications, Beverly Hills, 1985.